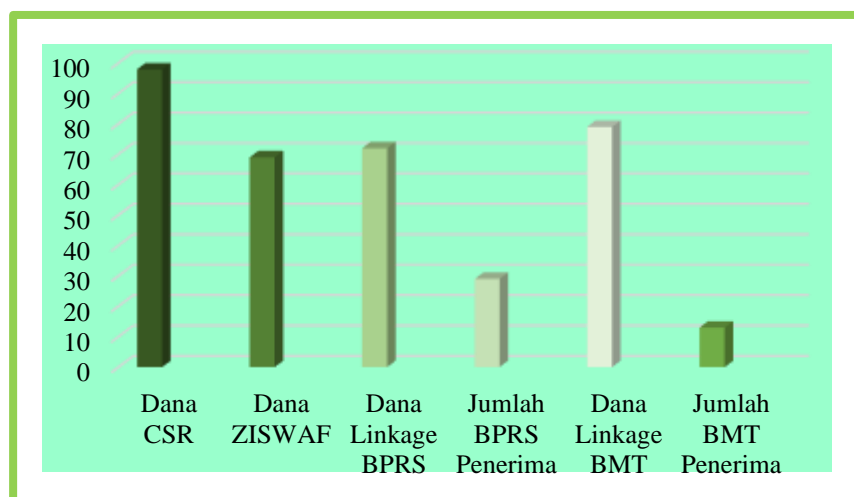


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latarbelakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu jenis bisnis yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada landasan prinsip-prinsip syariah dalam *Al-qur'an* dan *Al-Hadits*. Kedudukan perbankan syariah di Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang haramnya bunga bank (*riba*). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia kemudian menjadi semakin baik seiring dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan Syariah. Perkembangan perbankan syariah ini membawa konsekuensi tanggung jawab sosial perusahaan yang kemudian disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan data perbankan syariah tentang pelaksanaan fungsi sosial dan *linkage* program-nya, selama kurun waktu tahun 2008 – 2012, terlihat bahwa rata-rata pada periode tersebut yang tertinggi adalah pertumbuhan dana CSR (97,97%), hal tersebut disajikan dalam Gambar 1.1. sebagai berikut :



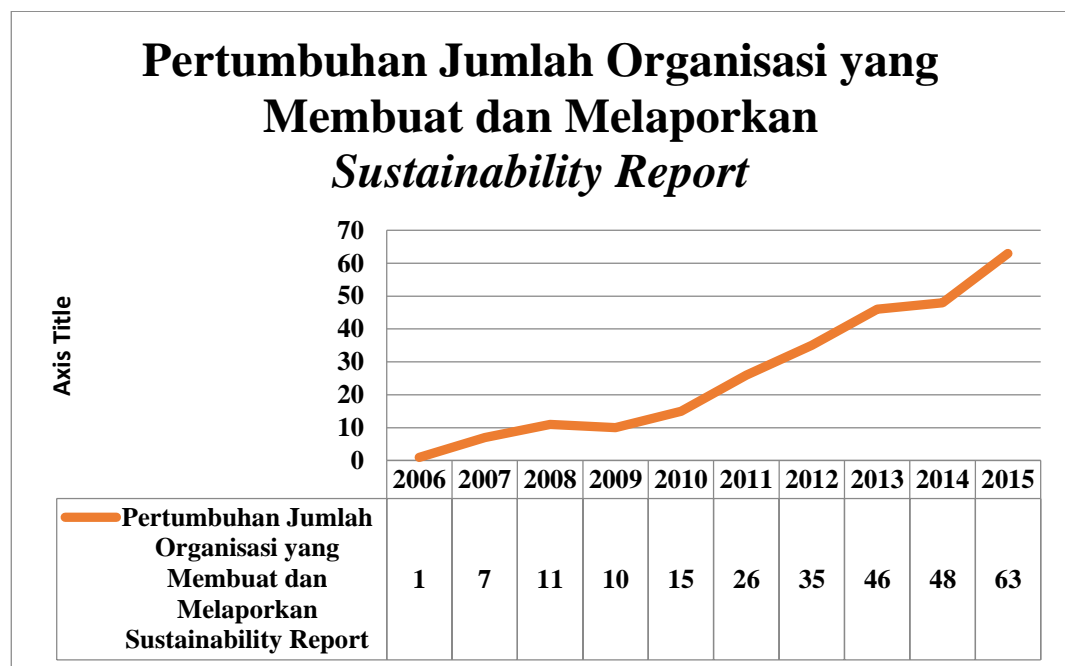
**Gambar 1.1. Rata- Rata Pertumbuhan Dana Sosial dan *Linkage* Program**

Sumber : Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (2012)

Pertumbuhan CSR yang besar ini sayangnya belum diikuti dengan pengaturan yang baik terhadap pelaporan kinerja sosial perbankan syariah (Gustani, 2013). Masih banyak perbankan Islam yang menggunakan indikator pedoman *Global*

*Reporting Initiative Index* (GRI) dalam laporan CSR mereka (Sunarsih & Ferdiyansyah, 2017).

Berdasarkan data yang didapat dari *Global Reporting Initiatives* (GRI), per Februari 2016 terdapat sebanyak 85 perusahaan yang telah membuat dan mempublikasikan laporan mereka. Untuk tahun 2015 total laporan yang telah dipublikasikan sebanyak 63 laporan, dimana kenaikan dari tahun sebelumnya (2014 ke 2015) lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun 2013 ke 2014. (Farizhabib, 2016).



**Gambar 1.2. Pertumbuhan Jumlah Organisasi yang Membuat dan Melaporkan Sustainability Report**

Sumber : *Global Reporting Initiatives* (2016)

Gambar 1.2. diatas menunjukkan perkembangan yang sangat baik terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Namun, CSR ini masih menggunakan indeks GRI yang bersifat konvensional. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam indeks GRI meliputi profil dan strategi organisasi, lingkup ekonomi, lingkup lingkungan dan lingkup sosial. Pengukuran ini tentunya tidak sesuai untuk sebuah perusahaan yang diakui menjalankan prinsip syariah. Perusahaan yang dinyatakan sesuai dengan hukum Islam harus mengungkapkan informasi sesuai dengan hukum Islam (Haniffa R. , 2002). Indeks GRI belum menjelaskan prinsip-prinsip Islam

juga belum dapat mengungkapkan apakah perusahaan tersebut terbebas dari unsur-unsur *riba*, *gharar*, dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh Islam.

Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa terdapat keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan ketentuan syariah yang kemudian dikenal dengan istilah *Islamic Social Reporting (ISR)*. Indeks ISR memiliki enam tema pengungkapan yaitu tema keuangan & investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema sosial, tema lingkungan dan tema tata kelola perusahaan yang kemudian masing-masing tema memiliki item indeks ISR turunan, secara keseluruhan jumlahnya sebanyak 48 item indeks ISR.

Keunggulan indeks ISR dibandingkan dengan indeks GRI adalah bahwa indeks ISR dapat mengungkapkan indikator-indikator yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang bebas dari unsur *riba*, spekulasi dan *gharar* dan mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek sosial seperti sedekah, wakaf, *qardh hassan*, hingga pengungkapan ibadah di lingkungan perusahaan (Sunarsih & Ferdiyansyah, 2017). Indeks ISR juga mampu menggambarkan aspek etis yang merepresentasikan akuntabilitas terhadap Tuhan dan manusia serta transparansi terkait seluruh kegiatan perusahaan, yang diperlukan oleh manusia untuk memastikan seluruhnya sesuai dengan ketentuan Allah SWT (Haniffa R. , 2002).

Penelitian Fitria dan Hartanti (2010) membandingkan antara skor indeks GRI dengan skor indeks ISR. Tabel berikut menunjukkan skor indeks GRI dengan skor indeks ISR.

**Tabel 1.1. Perbandingan Skor Indeks GRI dengan Skor Indeks ISR**

Nama	Bank Syariah		
	A	B	C
Skor GRI Index	52	66	58
Skor ISR Index	25	34	27

Sumber : Fitria & Hartanti (2010)

Berdasarkan Tabel 1.1. terlihat bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan ISR *index* pada bank syariah ternyata juga lebih rendah dibandingkan dengan GRI *index*. Nilai tertinggi hasil skoring diperoleh Bank Syariah B dengan nilai sebesar 34 . Bank Syariah A dan Bank Syariah C mendapat nilai sebesar 25

dan 27. Nilai ini masih jauh dari angka sempurna yaitu 144. Hal ini berarti bahwa pengungkapan CSR di bank syariah dengan menggunakan indeks ISR tidak lebih baik dibandingkan pengungkapan dengan menggunakan indeks GRI.

Fitria dan Hartati (2010) mengemukakan bahwa perkembangan indeks ISR di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam lainnya, hal ini berbeda dengan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam seperti Malaysia, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Palestina, Kuwait, Bangladesh, dan Qatar dimana indeks ISR telah menjadi bagian dari pelaporan organisasi syariah di negara-negara yang bersangkutan. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian-penelitian mengenai indeks ISR di negara-negara tersebut. Sedangkan menurut Sofyani (2012) bahwa berdasarkan Indeks ISR kinerja sosial bank syariah di Malaysia lebih baik dari pada bank syariah di Indonesia.

Sementara itu, penelitian Wardayanti & Wulandari (2014) membandingkan pengungkapan ISR antara Indonesia dan Malaysia, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank syariah baik di Indonesia maupun di Malaysia yang secara sempurna mengungkapkan tanggungjawab sosialnya mencapai skor hingga 100% dengan berdasarkan indeks ISR. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena terbatasnya pemahaman mengenai ISR, karena indeks ini masih terbilang baru dan belum difahami secara keseluruhan oleh perusahaan Islam.

ISR digagas pertama kali oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul "*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*". Lebih lanjut ISR dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan hingga saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

Adapun yang dimaksud dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah suatu kerangka konseptual pengungkapan CSR berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya membantu membuat keputusan untuk umat Islam, tetapi juga untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap Allah dan masyarakat secara luas. Kerangka konseptual tersebut sesuai dengan entitas Islam untuk mengungkapkan hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam sebagai suatu transaksi yang bebas dari unsur *riba*, spekulasi dan *gharar* dan mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek sosial seperti sedekah, wakaf, *qardh*

*hassan*, hingga pengungkapan ibadah di lingkungan perusahaan (Sunarsih & Ferdiyansyah, 2017).

Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah *Tauhid* (Tuhan Yang Esa) yang membentuk persepsi seorang Muslim untuk sedia menerima segala ketentuan Syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu *Al-qur'an* dan *Al-Hadist*, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, tidak menyekutukan-Nya, meyakini bahwa kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi, dan kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat *Al-qur'an* sebagai berikut :

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ وَإِلَى ٱللّٰهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمْوٰرُ ۝

Artinya : “Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan” (*Al-Hadid* [57] :5).

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوٰنًا فَأَحْيٰكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ٢٨

Artinya :”Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (*Al-Baqarah*[2] :28).

Adapun yang dimaksud indeks ISR adalah ukuran dari perilaku CSR perbankan Islam yang berisi standar item CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), yang kemudian lebih lanjut dikembangkan oleh para peneliti mengenai item CSR yang harus diungkapkan oleh entitas Islam (Othman, Thani, & Ghani, 2009) .

*Legitimacy theory*, *stakeholders theory*, dan *shari'ah enterprise theory* merupakan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan pengungkapan ISR. *Legitimacy theory* merupakan teori yang berdasarkan nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *stakeholder theory* merupakan teori yang mengedepankan kepentingan *stakeholders*, namun *stakeholders* yang dimaksud dalam teori tersebut adalah manusia. Sementara itu, *shari'ah enterprise theory* menjelaskan aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia (Triyuwono, 2012). Konsep *Shari'ah enterprise theory* mencakup akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas

vertikal adalah pertanggungjawaban perusahaan kepada Tuhan, sedangkan akuntabilitas horizontal terbagi menjadi dua jenis, yaitu *direct stakeholders* meliputi nasabah dan karyawan dan *indirect stakeholders* meliputi komunitas dan alam.

Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia menemukan bahwa tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia sudah cukup baik namun masih terbatas dan belum optimal yakni rata-rata 50% dari indeks ISR telah diungkapkan (Fauziah & Yudho, 2013). Selanjutnya, hasil penelitian Andraeny (2016) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR rata-rata dari 11 Bank Umum Syariah yang diteliti adalah 0,35 (35%). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Skor Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah Tahun 2014**

Dimensi ISR	BMI	BSM	BSMI	BRIS	BNIS	BCAS	BSB	BPS	BVS	BMSI	BTPN	Rata-rata
1. Investasi & Keuangan	0.46	0.36	0.38	0.38	0.31	0.31	0.08	0.23	0.23	0.08	0.08	0.27
2. Produk & Jasa	0.67	0.67	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
3. Tenaga Kerja	0.57	0.64	0.43	0.14	0.57	0.29	0.29	0.43	0.29	0.43	0.43	0.41
4. Sosial	0.69	0.81	0.38	0.63	0.81	0.31	0.63	0.50	0.13	0.31	0.38	0.49
5. Lingkungan	0.67	0.67	0.00	0.67	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
6. Tata Kelola Perusahaan	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Total Skor	0.59	0.61	0.28	0.39	0.53	0.23	0.25	0.28	0.19	0.22	0.23	0.35
Ranking	2	1	5	4	3	8	7	6	11	10	9	

Sumber : Andraeny (2016)

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan ISR pada masing-masing bank umum syariah tersebut berbeda-beda. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki tingkat pengungkapan tertinggi yaitu sebesar 61% dan Bank Victoria Syariah memiliki tingkat pengungkapan terendah yaitu sebesar 19%. Melihat masih rendahnya tingkat pengungkapan ISR Bank Syariah serta terdapat perbedaan pada pengungkapan ISR di setiap bank syariah, tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Islamic social reporting disclosure* tersebut. Penelitian berkaitan dengan determinan pengungkapan ISR telah banyak dilakukan dan hasil penelitian yang diperoleh pun beragam.

Adapun berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR, diantaranya *company size*, profitabilitas,

*leverage, Islamic Governance Score (IG- Score), the level of political and civil repression, the proportion of adherent Muslims in a country, IAH (Investment Account Holder) funds, dewan komisaris, Corporate Governance* dengan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris dan ukuran komite audit, kualitas audit dan jenis industri. Namun, determinan pengungkapan ISR yang digunakan di dalam penelitian ini hanya untuk menguji dua faktor saja, yaitu *company size* dan profitabilitas. Hal ini karena berdasarkan teori yang digunakan, serta berdasarkan hasil penelitian terdahulu, kedua faktor tersebut terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *ISR disclosure*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah ukuran perusahaan (*company size*). Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan ukuran ekuitas, nilai perusahaan, serta total aktiva (Lestari, 2013). Menurut Sunarsih & Ferdiyansyah (2017), semakin besar perusahaan, semakin besar pula ISR diungkapkan. Selain itu, perusahaan besar semakin jadi sorotan para *stakeholder*. Pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan besar pasti memiliki sumber daya, fasilitas dan sumber daya manusia yang lebih daripada perusahaan kecil. Secara khusus, semakin besar ukuran perusahaan dari organisasi yang menjalankan prinsip syariah, maka akan semakin besar pula *stakeholders* Muslim mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan yang menjalankan prinsip syariah dengan ukuran perusahaan yang lebih besar, akan cenderung membuat pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas daripada perusahaan kecil.

Hasil penelitian Othman (2009) membuktikan bahwa ukuran perusahaan secara positif signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, begitu juga dengan penelitian Rosiana, Arifin & Hamdani (2015), Sunarsih & Ferdiyansyah (2017) menyatakan bahwa pengungkapan ISR dipengaruhi secara positif signifikan oleh ukuran perusahaan. Namun penelitian Widayuni & Harto (2014) menyatakan bahwa ukuran bank tidak mempengaruhi pengungkapan ISR.

Penelitian sebelumnya juga telah membuktikan bahwa pengungkapan ISR meningkat seiring dengan semakin meningkatnya profitabilitas. Menurut Harahap (2010) profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh



profit melalui semua sumber daya yang ada. Suryono & Prastiwi (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada *stakeholder*-nya, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka, terutama investor dan kreditor. Othman (2009), Puji Lestari (2013) dan Widayuni & Harto (2014) menemukan hasil bahwa pengungkapan ISR secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh profitabilitas. Sementara penelitian Iswandika (2014), Rosiana, Arifin, & Hamdani (2015), Sunarsih & Ferdiansyah (2017) menemukan hasil bahwa pengungkapan ISR tidak dipengaruhi sama sekali oleh profitabilitas.

Faktor lainnya yang mempengaruhi pengungkapan ISR di bank syariah adalah *leverage*. *Leverage* menggambarkan hubungan utang terhadap modal atau aset perusahaan (Harahap, 2010). Menurut Suryono & Prastiwi (2011), *Leverage* memberikan sinyal yang negatif dalam pandangan *stakeholders*. *Stakeholders* akan lebih percaya dan memilih untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat. Oleh karena itu, perusahaan akan meminimalisir biaya-biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan ISR, agar kinerja keuangannya menjadi baik dan sehat. *Leverage* berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR (Widayuni & Harto, 2014). Sementara Iswandika, Murtanto & Sipayung (2014), Rosiana, Arifin & Hamdani (2015) membuktikan bahwa pengungkapan ISR tidak dipengaruhi oleh *leverage*.

Penelitian Farook, Hassan & Lanis (2011), Rahman & Bukair (2013), membuktikan bahwa selain faktor-faktor di atas terdapat faktor lain yang juga berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR yaitu *Islamic Governance Score (IG-Score)*. *Islamic Governance Score (IG-Score)* merupakan proksi dari karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diukur dari keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan serta pengalaman/reputasi (Farook & Lanis, 2005). Bank syariah yang memiliki lebih banyak anggota DPS yang memiliki pengetahuan tambahan dan pengalaman di bidang industri perbankan, akan memutuskan untuk memberikan lebih banyak informasi CSR nya dengan menggunakan indeks ISR. DPS yang kompeten cenderung akan meningkatkan tingkat pemantauan dan pengawasan, dan



sebagai hasilnya, akan didapat tingkat pengungkapan ISR yang lebih tinggi (Rahman & Bukair, 2013). Namun penelitian berbeda dilakukan oleh Inazula, Basri & Shabri (2015) yang hasilnya menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah secara parsial tidak memiliki peran yang signifikan dalam mengungkapkan *Islamic Social Reporting*.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, hasil penelitian Sayd Farook, M. Kabir Hassan & Roman Lanis (2011) membuktikan bahwa *the level of political and civil repression*, *the proportion of adherent Muslims in a country*, *Islamic Governance Score*, *IAH (Investment Account Holder) funds* juga signifikan terhadap *Islamic bank's ISR disclosure*. Kemudian berdasarkan penelitian Inuzula, Basri & Shabri (2015), Amirul Khoirudin (2013), Anita Anggraini & Mulyaning Wulan (2015), faktor lainnya adalah dewan komisaris yang memiliki peran yang signifikan secara parsial dalam pengungkapan ISR. Hal ini berbeda dengan penelitian Puji Lestari (2013) yang hasilnya menemukan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Semakin banyak proporsi komisi independen, tidak tentu meningkatkan ISR.

Iswandika, Murtanto & Sipayung (2014) menyebutkan faktor lain yaitu *Corporate Governance* dengan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris dan ukuran komite audit serta variabel kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Kemudian Anita Anggraini & Mulyaning Wulan (2015) menyebutkan bahwa variabel jenis industri terbukti signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat *Islamic social reporting disclosure* (ISR). Berbeda dengan hasil penelitian Rohana Othman, Azlan Md Thani & Erlane K Ghani (2009) yang menemukan bahwa *industry type* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan fenomena maraknya praktik CSR dalam dunia bisnis termasuk industri perbankan syariah, dan mengingat pentingnya *Islamic social reporting disclosure* pada Bank Umum Syariah serta beragamnya hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Islamic social reporting disclosure Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latarbelakang penelitian di atas, maka perlu menyusun identifikasi masalah yang diperlukan untuk merangkan masalah-masalah yang muncul pada objek yang diteliti. Adapun identifikasi masalah yang ditemukan antara lain :

1. Pertumbuhan dana CSR Bank syariah yang besar sayangnya belum diikuti dengan pengaturan yang baik terhadap pelaporan kinerja sosial perbankan syariah (Gustani, 2013).
2. Selama ini pengukuran CSR yang digunakan dalam perusahaan yang beroperasi berdasarkan syariah didasarkan pada *Global Reporting Initiative Index* (GRI). Bahkan, masih banyak perbankan Islam masih menggunakan indikator pedoman GRI dalam laporan CSR mereka (Sunarsih & Ferdiyansyah, 2017)
3. Pengukuran dengan indeks GRI tidak sesuai untuk sebuah perusahaan yang diakui menjalankan prinsip syariah. Indeks GRI belum menjelaskan prinsip-prinsip Islam juga belum dapat mengungkapkan apakah perusahaan tersebut terbebas dari unsur-unsur riba, gharar, dan transaksi yang dilarang oleh Islam (Haniffa R. , 2002).
4. Perkembangan indeks ISR di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam lainnya (Fitria & Hartanti, 2010).
5. Pengungkapan CSR di bank syariah dengan menggunakan indeks ISR tidak lebih baik dibandingkan pengungkapan dengan menggunakan indeks GRI (Fitria & Hartanti, 2010).
6. Tidak ada satupun bank syariah baik di Indonesia maupun di Malaysia yang secara sempurna mengungkapkan tanggungjawab sosialnya mencapai skor hingga 100% dengan berdasarkan indeks ISR (Wardanti & Wulandari, 2014).
7. Tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia sudah cukup baik namun masih terbatas dan belum optimal yakni rata-rata 50% (Fauziah & Yudho, 2013).

8. Tingkat pengungkapan ISR rata-rata dari 11 Bank Umum Syariah tahun 2014 yang diteliti adalah 0,35 (35%) (Andraeny, 2016).
9. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pengungkapan ISR adalah karena terbatasnya pemahaman mengenai ISR, karena indeks ini masih terbilang baru dan belum difahami secara keseluruhan oleh perusahaan Islam.
10. Terdapat perbedaan hasil penelitian tentang hubungan kausalitas faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic social reporting disclosure* (ISR).

### 1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latarbelakang penelitian serta identifikasi masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan *Islamic social reporting disclosure* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh *company size* terhadap *Islamic social reporting disclosure* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *Islamic social reporting disclosure* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh *company size* dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap *Islamic social reporting disclosure* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperoleh gambaran tentang perkembangan *Islamic social reporting disclosure* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, untuk mengidentifikasi dan memperoleh gambaran tentang pengaruh *company size* terhadap *Islamic social reporting disclosure* dan pengaruh profitabilitas terhadap *Islamic social reporting disclosure* serta pengaruh *company size* dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap *Islamic social reporting disclosure* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah keilmuan mengenai determinan *Islamic social reporting disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori, konsep ilmiah dan referensi dalam ilmu ekonomi, bisnis, akuntansi keuangan dan manajemen khususnya mengenai pentingnya *Islamic social reporting disclosure* yang merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan – perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini juga dilakukan agar dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori dan juga penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi masukan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian dalam disiplin Ilmu Keuangan dan Perbankan Islam